



MENTERI JOKOWI 'REBUTAN' KURSI SENAYAN HARUSKAH MUNDUR DARI JABATAN?

KPU sudah membuka pendaftaran calon anggota DPR dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota mulai 1 Mei lalu hingga 14 Mei nanti. Beberapa nama yang sudah dikenal masyarakat pun mencuat dari daftar para bakal calon legislatif (caleg) tersebut, diantaranya adalah para menteri yang saat ini berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bolehkah para menteri yang mendaftarkan diri menjadi caleg tetap duduk di kursi kabinet? Adakah aturan yang melarang menteri harus mundur jika menjadi caleg? Sejauh ini, tak ada aturan yang melarang menteri jadi caleg atau mengharuskan menteri mundur jika menjadi calon anggota legislatif. Kekhawatiran akan mengganggu pekerjaan sebagai 'pembantu' presiden tentu saja mencuat. Konflik kepentingan saat menjalankan tugas negara dan politik di saat bersamaan pun potensi terjadi. Kepentingan rakyat jangan sampai dikorbankan. Semoga.

(Baca Hal 11)

Government (Hal2)
Kisruh Utang Migor
Rp 344 Miliar KPPU
Turun Tangan,
Minta Pemerintah
Segera Bayar

BEBERAPA MENTERI JOKOWI YANG DIKABARKAN NYALEG DI PEMILU 2024

IDA FAUZIYAH MENTERI KETENAGAKERJAAN (MENAKER)



Ida Fauziyah juga disebut-sebut hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Pemilu 2024. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dikabarkan bakal maju dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri.

AFRIANSYAH FERRY NOOR WAKIL MENTERI TENAGA KERJA (WAMENAKER)



Afriansyah Ferry Noor juga dipastikan akan maju sebagai caleg Pemilu 2024. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PBB) itu bakal mencalonkan diri di Dapil Jawa Barat V yang meliputi Kabupaten Bogor.

ABDUL HALIM ISKANDAR, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (MENDES PDDT)



Abdul Halim Iskandar juga dikabarkan bakal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKB. Pemilu 2024 akan menjadi kontestasi pemilihan pertama bagi Abdul Halim di tingkat DPR RI. Meski begitu, Abdul Halim sebelumnya telah malang melintang sebagai anggota DPRD. Tahun 2019-2009, Abdul Halim menjabat sebagai Ketua DPRD Jombang, Jawa Timur.

ZULKIFLI HASAN MENTERI PERDAGANGAN (MENDAG)



Zulkifli Hasan menjadi salah satu menteri Jokowi yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu rencananya bertarung di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Kisruh Utang Migor Rp 344 Miliar

KPPU Turun Tangan, Minta Pemerintah Segera Bayar

JAKARTA - Kisruh pembayaran utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng senilai Rp 344 miliar, antara Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sampai turun tangan. KPPU berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang baru atau meminta Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) agar bisa segera membayar kewajiban itu.

Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamanggala, menyanggah apabila pemerintah terus bersikeras mengulur waktu atau bahkan tidak membayar utangnya tersebut. Sebab, kata dia, peritel serta produsen minyak goreng sejatinya telah menelan kerugian yang tidak sedikit akibat kebijakan rafaksi yang hanya sebulan itu. "Itu kan kerugiannya tidak sedikit. Dari data Aprindo, kebijakan yang hanya sebulan saja itu sudah mencapai Rp344 miliar. Itu dari sisi Aprindo, belum lagi dari sisi produsen minyak goreng kemasan yang diperkirakan mencapai Rp700 miliar," ujar Mulyawan dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/5/2023).

Dia menuturkan kebijakan rafaksi minyak goreng tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Menurut Mulyawan, akibat ketidakpastian pembayaran rafaksi minyak goreng itu berdampak berat ke depannya karena pemerintah sudah tidak dipercaya pelaku usaha. Padahal, saat ini pelaku usaha lebih dari 90 persen menguasai industri minyak goreng. "Kebijakan ini akan sangat berbahaya jika pemerintah

tidak menepatinya, di sisi lain trust pelaku usaha kepada pemerintah harus dijaga. Karena merekalah di lapangan mengalami sendiri, menghadapi apa yang terjadi selama pelaksanaan itu terjadi," jelas Mulyawan.

Lebih lanjut, Mulyawan mengusulkan agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Permendag atau meminta diterbitkannya Keppres kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid tersebut sebagai landasan untuk membayarkan utang rafaksi minyak goreng. "Jadi dengan konferensi pers ini, mendorong juga supaya pemerintah mempercepat prosesnya pembayaran itu. Saran juga kepada Kemendag, bisa juga mengeluarkan Permendag yang baru atau di atasnya, bisa perintah atasannya lewat Keppres lewat presiden. Semuanya menjadi aman," tutur Mulyawan.

Duduk Bersama

Sementara, Komisioner KPPU, Chandra Setiawan menyampaikan, sesuai hasil rapat komisi pada tanggal 4 Mei 2023 lalu telah memutuskan agar KPPU memanggil Aprindo dan Kemendag untuk duduk bersama membicarakan kronologi yang sebenarnya dari kasus pembayaran rafaksi minyak goreng tersebut.

"KPPU memanggil Aprindo dan Kemendag untuk dengar secara bersama apa real problemnya. Karena seperti yang diketahui, berdasarkan Undang Undang Nomor 5/1999 pasal 3, KPPU punya kewajiban mewujudkan situasi yang kondusif bagi pelaku usaha baik usaha kecil, menengah, besar melalui persaingan sehat," kata



Produk Minyakita merupakan program satu harga minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan kenaikan harga di pasar. (dok)

Chandra dalam konferensi pers terkait pembayaran rafaksi minyak goreng, Rabu (10/5/2023).

Adapun pertemuan tersebut, kata dia, sekaligus mencegah praktek monopoli bilamana Aprindo tetap melakukan pemboikotan minyak goreng di ritel-ritel modern miliknya. "Kalau dia melakukan boikot tidak mau jual dan sebagainya itu kan potensi melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999. Oleh karena itu kita ingin mendapatkan real problemnya, sehingga situasi yang kondusif bagi pelaku usaha itu bisa terjamin, bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.

Chandra mengakui bahwa pembayaran rafaksi minyak goreng merupakan persoalan yang sudah cukup lama. Di mana pada saat itu Menteri Perdagangan (Mendag) yang menjabat masih Muhammad Luthfi.

"Pada bulan Januari 2022 itu terjadi berbagai macam pengeluaran peraturan-peraturan oleh Kementerian Perdagangan, yang meminta pelaku usaha antara lain Permendag Nomor 3 Tahun 2022, pada tanggal 19 Januari. Peraturan itu kan menghendaki adanya pemenuhan kebutuhan minyak goreng dengan satu harga," terangnya.

"Jadi akhirnya Aprindo itu melalui anggota-anggotanya menginstruksikan agar sesuai Permendag itu menjual dengan harga Rp 14.000 per liter, berapapun harga yang mereka beli," lanjut dia.

Di mana selisih antara harga acuan keekonomian (HAK) dan harga eceran tertinggi (HET) dalam Permendag nomor 3/2022 dicantumkan bahwa pembayaran selisih harga akan dilakukan oleh pemerintah melalui BDPDKS kepada pelaku usaha. Sementara HAK ditetapkan sebesar Rp 17.260 per liter, kemudian HET Rp

14.000 per liter.

"Selisihnya itu yang dibayarkan pemerintah, tetapi ini harus melalui proses verifikasi yang panjang dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan itu mengalami keterlambatan untuk menunjuk verifikatornya, sehingga keterlambatan itu mengakibatkan verifikasinya berjalan cukup panjang melampaui waktu yang seharusnya. Sedangkan ada peraturan Permendag yang sudah dinyatakan tidak berlaku," jelas Chandra.

KPPU melihat, lanjut dia, memang permasalahannya adalah karena adanya ketidakpastian hukum dan juga kemudian Kementerian Perdagangan yang mengalami keterlambatan sehingga ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, harus diselesaikan oleh pemerintah agar kerugian dari pelaku usaha tidak semakin besar dan akhirnya akan merugikan konsumen.

"Tren deviasi antara minyak goreng dan CPO sudah semakin melebar lagi, kalau melebar berarti kecenderungannya CPO-nya turun, harga minyak gorengnya tidak turun. Artinya, mulai ada tanda-tanda seperti itu tahun 2023 dibandingkan dengan tahun lalu ya," ujarnya.

"Sehingga ini pasti akan tidak kondusif bagi pelaku usaha jika tidak diselesaikan dengan segera, dan sekaligus akan merugikan konsumen," pungkask dia.

Adapun, rencana pertemuan antara Kemendag dengan Aprindo dan produsen minyak goreng, kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, rencananya akan digelar pada Kamis (11/5/2023) atau besok. "Besok (rencana pertemuannya)," kata Isy Karim saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (10/5/2023). (wid,rls,mer,kum/dya)

RATA-RATA HARGA MINYAK GORENG NASIONAL SETAHUN TERAKHIR (APRIL 2022-JANUARI 2023)

TANGGAL	MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM (RP/LITER)	MINYAK GORENG KEMASAN CURAH (RP/LITER)
04-2022	26.323	17.964
05-2022	25.983	16.899
06-2022	25.652	16.316
07-2022	24.322	15.137
08-2022	22.474	14.040
09-2022	21.659	13.795
10-2022	20.967	13.677
11-2022	20.855	13.902
12-2022	20.993	14.112
01-2023	21.035	14.419

Sumber:
Kementerian
Perdagangan

RUU Perampasan Aset

Bocoran Kemenkumham: Minimal Rp 100 Juta

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) mengungkapkan nilai aset yang dapat dijerat hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset minimal Rp100 juta. Aturan ini guna memaksimalkan perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hal itu dikatakan oleh Deputi III Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo dalam webinar yang digelar oleh Ikal Strategic Center pada Rabu (10/5/2023).

Sugeng menyebutkan aset mana saja yang dapat dirampas. Pertama, aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung/tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan/dikonversikan. Kedua, aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Ketiga, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah.

"Keempat, aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana," kata Sugeng dalam kesempatan itu.

Sugeng menyinggung nilai minimal aset yang bisa ditindak oleh RUU Perampasan Aset. Jumlah itu berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. "Nilai aset minimal Rp100 juta dan tindak pidananya diancam penjara empat tahun atau lebih," sebut Sugeng.

Sugeng menegaskan perampasan aset tindak pidana merupakan upaya paksa dari Negara guna mengambil aset tindak pidana. Hal ini didasari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. "Ini bisa dilakukan tanpa berdasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya," ujar Sugeng.

Sehingga perampasan aset dapat dilakukan meski tersangka atau terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen atau tak diketahui keberadaannya. Bahkan terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau perkara pidananya tak dapat disidangkan tak lolos dari jerat RUU Perampasan Aset. Begitu pun terpidana yang dikemudian hari terdapat aset yang ternyata belum dirampas masih bisa dikejar RUU Perampasan Aset.

"Perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana," ucap Sugeng.

Sugeng juga menjelaskan pihak yang mempermasalahkan pemblokiran maupun penyitaan bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik paling lambat 14 hari sejak tanggal pemblokiran atau penyitaan. Adapun

perlawanan terhadap upaya itu diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum atau pada hari persidangan. "Perlawanan tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, status DPO, terdakwa sidang in absentia," ucap Sugeng.

Baleg DPR: Masuk Prioritas Pembahasan

Untuk diketahui, pemerintah sudah mengirimkan naskah akademik RUU Perampasan Aset dan surat presiden (surpres) kepada DPR RI. Kini, RUU itu telah masuk ke dalam prioritas yang akan disahkan oleh wakil rakyat tersebut.

"RUU Perampasan Aset telah dimasukkan ke dalam prioritas-prioritas di 2023," ucap Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi, Rabu (10/5/2023).

Perjalanan RUU Perampasan Aset memakan waktu yang cukup lama. Sudah masuk prolegnas di 2020, hingga kini RUU itu baru masuk prioritas untuk disahkan.

Achmad mengatakan pihaknya bukan tidak ingin memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam prioritas. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi faktor RUU itu baru masuk prioritas di 2023. Achmad juga mengungkapkan bahwa DPR harus menyelesaikan dua RUU yang sebelumnya telah 'antre' dalam daftar prioritas yang harus disahkan. Dua RUU itu yakni Cipta Kerja dan IKN. Achmad menyebut antara DPR dan Presiden memiliki perjanjian untuk kouta prioritas tersebut. "Bukan berarti kami menolak, tetapi slot yang tersedia dari usulan pemerintah sudah melebihi kuota," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR sempat dituduh oleh masyarakat tidak memproses RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Dasco mengungkapkan, saat itu surat presiden (surpres) terkait RUU Perampasan Aset memang belum pernah sampai ke DPR. Adapun surpres RUU Perampasan Aset baru dikirim ke DPR pada 4 Mei 2023 lalu. "Yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, bahwa kemarin-kemarin ini kan DPR dituduh tidak memproses



Unjuk rasa mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset terus dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. (ilustrasi.dok)

Undang-Undang Perampasan Aset, padahal itu kan surpres-nya belum pernah ke DPR, belum sampai. Ini baru sampai," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan.

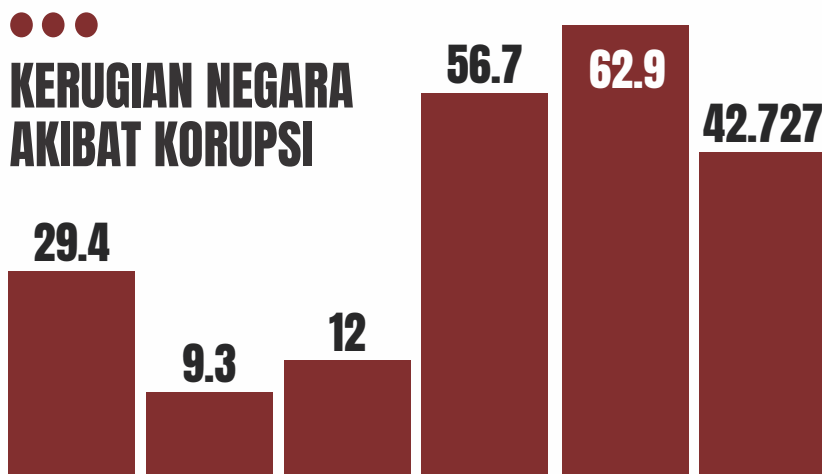
Dasco mengatakan, setelah menerima surpres terkait RUU Perampasan Aset, DPR pasti akan memproses sesuai mekanisme yang ada. Hanya saja, saat ini DPR masih dalam masa reses sehingga baru bisa melaksanakan sidang atau rapat kembali pada 16 Mei 2023 nanti. Kemudian, Dasco mengingatkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara hati-hati. "Itu pembahasan yang komprehensif dan hati-hati, karena ini kan juga menyangkut beberapa aturan yang mesti disinkronkan mengenai hal-hal yang tentunya akan juga menimbulkan dinamika yang ada apabila kita tidak hati-hati," katanya. Oleh karena itu, politikus Gerindra ini mengatakan, cepat atau lambat pembahasan RUU Perampasan Aset tergantung pada daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah juga.

Diketahui, pemerintah menunjuk 4 utusan untuk membahas RUU Perampasan Aset di DPR. Adapun

keempat perwakilan itu termasuk Menko Polhukam Mahfud Md hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Ada empat pejabat setingkat menteri yaitu dua orang menteri. Satu Menko Polhukam, yang kedua Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga pejabat setingkat menteri adalah Jaksa Agung, yang keempat pejabat setingkat menteri adalah Kapolri," ujar Mahfud. Dari Mahfud hingga Kapolri ditugaskan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset nantinya. (wid, rtr, ist/dya)

ASET MANA SAJA YANG DAPAT DIRAMPAS:

1. Aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung/tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan/dikonversikan.
2. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
3. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah.
4. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana," kata Sugeng dalam kesempatan itu.



Bupati Marhaen Dukung Penuh TMMD di Kecamatan Ngluyu



Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi bersama para pejabat meninjau pembangunan jalan yang menjadi program TMMD ke-116 tahun 2023 di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Rabu (10/5/2023)

NGANJUK – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, bersama Komandan Kodim (Dandim) 0810 Kabupaten Nganjuk, Letkol Inf Tri Joko Purnomo membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-116 tahun 2023 di wilayah Kecamatan, Ngluyu, Rabu (10/5/2023) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Marhaen mengatakan bahwa Pemkab Nganjuk sangat mendukung program TNI yang akan berlangsung hingga Juni mendatang. Terlebih lagi, target dari TMMD kali ini adalah pembangunan jalan yang sebelumnya cukup terisolir di kawasan Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu. Jalan tersebut akan menghubungkan dengan perbatasan Kabupaten Bojonegoro.

“Alhamdulillah jalan yang selama ini susah kita tembus dengan anggaran-anggaran yang ada, Alhamdulillah dengan sinergi kita bersama-sama Pemda dan TNI wujud TNI Manunggal Membangun Desa, Alhamdulillah hari ini kita buka, insya Allah nanti tanggal 8 Juni kita akan tutup kita akan buat program-program baru lagi yang kira-kira akses-akses jalan agak berat tempuh bersama-sama kita laksanakan bersama-sama,” kata bupati yang akrab dengan panggilan Kang Marhaen dalam sambutannya, Rabu (10/5/2023).

Ditemui setelah upacara pembukaan, Kang Marhaen juga mengungkapkan bahwa keberadaan jalan tersebut sangat penting untuk menunjang aktifitas khususnya perekonomian masyarakat setempat. “Ini (jalan) yang dibutuhkan masyarakat, terutama di Ngluyu khususnya di Bajang. Sebab, pembangunan jalan dan fisik dan Pak Dandim luar biasa,” katanya.

“Sekali lagi, kita ingin memantapkan, karena program Pak Dandim ini luar biasa. Maka, saya, Bupati mensupport betul,” tegasnya.

Terhususnya untuk pembangunan

jalan yang terisolir coba dibuka dalam program ini. Jalan yang rencananya sebagian akan dibeton dan menghubungkan dengan Kabupaten Bojonegoro ini akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya untuk menunjang sektor ekonomi, sehingga diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Warga Bojonegoro di pinggirannya lebih senang belanja dan kegiatannya di Ngluyu. Maka, kita berikan semacam support Pemda ini pada Pak Dandim yang punya program TMMD tahun ini. Sehingga, masyarakat juga antusias sekali,” sambungnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa, program yang akan dilakukan dalam TMMD ini tidak hanya bergerak dalam bidang fisik saja, namun juga ada kegiatan non fisik. Seperti, bakti sosial dengan pemberian bantuan dan juga pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat. Selain itu juga ada kegiatan yang bersifat hiburan sehingga masyarakat bisa merasakan senang.

Selain itu juga banyak kegiatan yang turut melibatkan instansi Pemkab Nganjuk. Termasuk melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kepemudaan, Dinas Perkim, Dinas Sosial dan masih banyak lagi. “Maka, program Pak Dandim ini kita support dari beberapa dinas itu. apa yang kita bisa bantu, toh ini juga untuk masyarakat Nganjuk. Sehingga kita juga merasa terbantu. Maka, sekali lagi, kita atas nama Pemkab Nganjuk dan Bupati Nganjuk mengucapkan banyak terimakasih pada TNI khususnya Pak Dandim yang programnya luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Dandim 0810 Nganjuk, Letkol Inf Tri Joko Purnomo mengatakan bahwa dalam TMMD kali ini melibatkan 150 personel terdiri dari TNI AD, TNI AU, serta dari kepolisian. “Proyek utama kita membuka jalan panjangnya 4.225

meter, terdiri dibagi dua yang satu kita buka nanti lapisan pondasi atas dan bawah, dan separoh lagi kita cor,” jelasnya.

Dia menandaskan, pengerjaan proyek jalan tersebut diperkirakan memakan waktu satu bulan. Namun demikian, sebagaiantisipasi dan supaya selesai tepat waktu, maka pengerjaan sudah dimulai beberapa hari yang lalu. “Rencananya jalan itu tembus dari Bajang, dusun Krodong sampai pada perbatasan Bojonegoro,” tandasnya.

Selesai upacara pembukaan yang dipusatkan di lapangan Kecamatan Ngluyu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, beserta pejabat yang lain yaitu Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Sekda Nganjuk Nur Solekan, Dandim 0810 Tri Joko Purnomo, Kejari Nganjuk Alamsyah, Kapolres Nganjuk, Asisten Ekbang Yudi Ernanto, Kadis PUPR Gunawan Widagdo, Dirut Excindo 57 Panito, Perguruan Pencak Silat, Forkopimcam Ngluyu Dan tamu undangan melakukan peninjauan di titik nol pembangunan jalan.

Saat menuju lokasi, Bupati Marhaen dan beberapa pejabat lainnya terpaksa mengendarai sepeda motor. Sebab, kondisi jalan yang sedang dibangun tersebut belum memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda empat.

Selain di Nganjuk, TMMD ke-116 juga berlangsung di Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto menjadi inspektur upacara pembukaan di lapangan Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Rabu (10/5/2023).

Turut hadir Komandan Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya, Komandan Kodim 0815/Mojokerto, Letkol Inf Iqbal Prihanta Yudha didampingi jajaran Polres Mojokerto, OPD serta staf Kodim 0815/ Mojokerto. Pada TMMD dengan tema ‘Sinergi Lintas Sektorat Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat’.

Ada enam sasaran pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Yakni, Jalan Usaha Tani Desa Randuharjo terdapat dua titik yang berada di Dusun Kamotan Wetan dengan panjang 855 meter x 2,5 meter. Sementara di Dusun Randurancang dengan panjang 195 meter x 2,5 meter.

Sasaran kedua, yakni Jalan Lingkungan Desa Randuharjo yang berada di Dusun Kamotan Wetan dengan ukuran 255 meter x 4 meter dan jalan di Dusun Randurancang dengan ukuran 205 meter x 4 meter. Sasaran ketiga, yakni rehab Mushola Nurul Hidayatulloh yang berada di Dusun Arjosari dengan anggaran Rp100 juta.

Sasaran keempat yakni rehab ruang kelas SDN Randuharjo 2 dengan

anggaran Rp200 juta. Terdapat sasaran tambahan yakni pembangunan jambanisasi dengan anggaran Rp213 juta lebih dengan sasaran realisasi 16 unit jamban serta renovasi rumah tidak layak huni sejumlah sembilan unit dengan anggaran Rp180 juta.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyampaikan, program TMMD tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan serta memperkuat kemandirian TNI dengan rakyat. “Tujuan utama program TMMD adalah pemerataan pembangunan nasional untuk lebih sejahtera, adil dan gotong royong, serta memperkuat kemandirian TNI dengan masyarakat,” ungkapnya, dikutip dari beritajatim.com.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto menjelaskan, proses perencanaan TMMD tahun 2023 ini, direncanakan dengan sistem perencanaan ‘bottom up’. Dimana perencanaan pembangunan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.

“Sasaran kegiatan ditetapkan dan diakomodir kedalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dengan total anggaran sebesar satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah. Program TMMD merupakan sarana untuk membantu pemerintah daerah dalam member-dayakan masyarakat,” katanya. (lut/dya)



Alhamdulillah jalan yang selama ini susah kita tembus dengan anggaran-anggaran yang ada, Alhamdulillah dengan sinergi kita bersama-sama Pemda dan TNI wujud TNI Manunggal Membangun Desa, Alhamdulillah hari ini kita buka, insya Allah nanti tanggal 8 Juni kita akan tutup kita akan buat program-program baru lagi yang kira-kira akses-akses jalan agak berat tempuh bersama-sama kita laksanakan bersama-sama,”

MARHAEN DJUMADI

Bupati Nganjuk



Baru Setahun Dibangun Senilai Rp 500 Juta, Gedung Korpri Tuban Ambruk



Gedung Korpri di Tuban yang ambruk, Selasa (9/5/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.

TUBAN - Gedung Korpri Tuban di dalam kawasan Pendopo Krido Manunggal yang baru dibangun pada 2022 lalu ambruk. Gedung yang dikerjakan PT Turangga Jaya Sakti tersebut menggunakan anggaran P APBD 2022 senilai Rp 532.905.489,21.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tuban Arif Handoyo mengatakan pihaknya segera



Ini masih dilakukan pengecekan oleh tim teknis, nanti kami informasikan kembali, mohon bersabar,"

ARIF HANDOYO

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tuban

melakukan pengecekan atas gedung baru Korpri Tuban. Namun demikian, belum diketahui penyebab ambruknya gedung baru tersebut.

"Segera dilakukan pengecekan penyebabnya, ini masih masa pemeliharaan," ujar Arif Handoyo, dikutip dari beritajatim.com, Rabu (10/5/2023).

Lebih lanjut dia menandakan bahwa, gedung tersebut diketahui ambruk pada Selasa (9/5/2023) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat ditanya apakah terkena hujan disertai angin, pihaknya belum bisa memberikan keterangan. Ia juga menyampaikan, setelah dilakukan pengecekan secepatnya segera dilakukan perbaikan oleh kontraktor yang menjadi penanggung jawab pembangunan gedung Korpri tersebut "Ini masih dilakukan pengecekan oleh tim teknis, nanti kami informasikan kembali, mohon bersabar," kata Arif.

Setelah kejadian tersebut, pintu masuk menuju Pendopo Krido Manunggal dijaga ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tuban dan tidak boleh memasuki area tersebut selama pengecekan.

Terkait dengan tender proyek tersebut, Arif enggan menjelaskan. Namun Merujuk data LPSE, proyek gedung Korpri Tuban masuk dalam proyek rehabilitasi permanen yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2022. Nilai pagunya sebesar Rp558.236.590 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp549.832.650. Dari data itu juga diketahui terdapat 22 kontraktor yang mengikuti tender proyek gedung Korpri Tuban. Sementara, kontraktor yang terpilih adalah PT Turangga Jaya Sakti dari

Kecamatan Merakurak dengan harga penawarannya Rp532.905.489,21.

Setelah memenangkan tender, PT Turangga Jaya Sakti langsung melakukan tanda tangan kontrak pada November 2022. Sedangkan, hingga saat ini proyek tersebut masih dalam keadaan baru selesai dan belum diserahkan kepada Pemkab Tuban.

Satreskrim Polres Tuban menyelidiki ambruknya gedung korpri di kawasan Pendopo Kridha Manunggal. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan pengamatan atas runtuhnya material gedung, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait.

"Kami cek atas bangunan atap yang runtuh, tidak ada korban jiwa," kata Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP M Gananta kepada wartawan di lokasi, Rabu (10/5/2023).

Perwira pertama itu menjelaskan, gedung yang baru selesai diperbaiki masih dalam masa pemeliharaan. Pihaknya masih menunggu hasil dari tim internal Pemkab terlebih dulu, setelah hasil keluar maka baru bisa ditindaklanjuti. "Kami masih tunggu kajian dari tim teknis internal Pemkab dulu, atas ambruknya gedung," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, menyatakan perbaikan gedung tersebut masih masa pemeliharaan sehingga rekanan yang mengerjakan harus bertanggung jawab.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa yang ambruk yaitu atap dan bagian dinding. Belum diketahui apa penyebab ambruknya atap dan sebagian dinding, saat ini tim teknis sedang melakukan kajian. "Penyebabnya belum diketahui, akan dikaji tim

teknis, juga inspektorat. Tidak ada korban jiwa," pungkasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menyoroti ambruknya Gedung Korpri yang berada di lingkungan Pendopo Pemkab Tuban. "Kami akan panggil pihak-pihak terkait dalam minggu ini," kata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Fahmi Fikroni dikutip dari surya.co, Rabu (10/5/2023).

Politisi PKB itu menjelaskan, pihaknya akan meminta keterangan dari kontraktor. Ia mengaku belum sempat sidak ke lokasi, tapi dugaan awalnya karena kontraktor menjejat target agar proyek bisa segera selesai sehingga cara pengerjaannya asal-asalan.

"Dugaannya karena kontraktor asal-asalan, karena mepetnya waktu yang diberikan setelah proses lelang," terangnya.

Ambruknya gedung yang dibangun dengan anggaran pemerintah tidak hanya terjadi di Tuban saja, namun peristiwa serupa juga pernah menimpa Gedung Puskesmas Torjun, Kabupaten Sampang ambruk, pada 20 Januari 2019 lalu.

Pembangunan Gedung Puskesmas Torjun tersebut dengan nilai kontrak Rp 1,7 miliar yang dikerjakan oleh CV Yala Indah Perkasa. Pada saat pengerjaan, pembangunan Puskesmas memang sudah bermasalah karena melebihi masa kontrak pada 29 Desember 2018 lalu, bahkan Dinas Kesehatan setempat telah memutus kontrak terhadap rekanan.

Saat itu, Amin Tirtana Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sampang mengaku sangat menyayangkan atas kondisi bangunan yang baru dibangun tersebut. "Dalam proses pengerjaannya sudah melebihi masa kontrak, bahkan sudah melakukan perpanjangan kontrak hingga diputus kontrak. Dan ini lagi terjadi ambruk," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa ambruknya gedung tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi dinas terkait. Sehingga ke depan, hal demikian tidak terulang kembali. "Hal ini yang jelas adalah kesalahan atau mungkin kekurangan perencanaan dan pengawasannya. Evaluasinya ke depan jangan sampai terjadi hal serupa terhadap pembangunan di Sampang lainnya," tuturnya.

Padahal, pihak pemerintah setempat saat itu menyatakan jika kondisi bangunan dinyatakan dalam kondisi bagus dan sesuai dengan pengerjaan yang sudah mencapai 82 persen. Untuk itu, pihak rekanan diminta berkomitmen untuk memperbaiki secepatnya menjadi seperti sediakala.

Faktor penyebab kejadian itu juga belum diketahui, namun dari hasil laporan pihak konsultan pengawas menyatakan pengerjaan tersebut sesuai dengan RAB dan materialnya sesuai spesifikasi. (lut/dya)



ZASKIA MECCA

Ajak Berobat di Dalam Negeri

Foto-Foto : Instagram/zaskiadyamecca

SELEBRITAS Zaskia Adya Mecca mengajak masyarakat untuk berobat di dalam negeri alih-alih ke luar negeri, sebab menurutnya dokter-dokter di Indonesia juga sama berkualitasnya dengan dokter-dokter di luar negeri.

"Berobat di Indonesia, tenang aja karena kita juga punya tenaga medis yang sudah luar biasa," Zaskia dalam acara temu media di Jakarta, Rabu.

Istri sutradara Hanung Bramantyo itu pun bercerita bahwa ia telah membuktikan hal tersebut saat anaknya mengalami serangan asma. Saat itu, ia mengaku panik dan sangat kebingungan sampai akhirnya merasa harus membawa anaknya berobat ke Singapura.

"Jujur aku bingung, aku sampe pergi ke Singapura karena aku butuh second opinion. Pak Jokowi memang pernah bilang kalau mau berobat ya di dalam negeri aja. Tapi namanya aku kalut, aku panik, jadi aku bawa keluarga aku ke Singapura," tutur Zaskia.

Saat berkonsultasi dengan dokter di Singapura, Zaskia mengatakan dirinya menceritakan apa saja perawatan yang anaknya dapatkan dari dokter di Indonesia.

Setelah menceritakan itu, Zaskia pun mendapatkan jawaban bahwa perawatan yang dilakukan saat berobat di Indonesia sudah tepat.

"Dokternya bilang, semua yang dilakukan oleh dokter kamu (di Indonesia), baik obatnya, treatment-nya, itu sudah tepat. Jadi saya enggak tahu harus ngapain lagi, katanya," ujar perempuan berusia 35 tahun itu.

"Jadi imbauan Pak Jokowi itu benar bahwa pengobatan kita, dokter kita, semua udah baik di sini. Enggak usah jauh-jauh ke negara orang," pungkas Zaskia Adya Mecca.

Karir Zaskia Mecca

Dunia modeling mengantarkan Zaskia Mecca ke panggung hiburan. Lewat film dan sinetron, namanya menjadi terkenal.

Pemilik nama lengkap Zaskia Adya Mecca ini mengawali karier sebagai runner up Model Kawanku 2001 saat usianya 14 tahun. Langkah awal itu telah membuka pintu gerbang kesuksesan di dunia hiburan. Setahun kemudian, Zaskia pun mendapatkan peran pendukung dalam sinetron Cinta SMU dan Senandung Masa Puber.

Nama putri dari pasangan Eka Dewanta Insan Kamil dan Rafida Kamil ini semakin dikenal setelah membintangi sinetron arahan Deddy Mizwar bertajuk Kiamat Sudah Dekat pada tahun 2003. Di sinetron tersebut, Zaskia berperan sebagai wanita berhijab bernama Sarah. Wanita keturunan Sunda-Aceh-Jerman ini juga memutuskan berkerudung sejak 25 Januari 2005, tepat usianya 18 tahun.

Meski berhijab, namun anak kedua dari 7 bersaudara ini tetap aktif tampil di berbagai sinetron. Beberapa sinetron lain yang diperankannya yaitu, Habibi dan Habibah, Munajah Cinta, Kubersimpuh PadaMu, Lorong Waktu, dan Para Pencari Tuhan.

Alumni Universitas Paramadina ini pernah membintangi FTV TVRI yang diarahkan oleh sutradara Rudy Imam bertajuk Ibunda. Zaskia juga

melebarkan sayapnya ke layar lebar. Pada tahun 2007, ia syuting untuk film drama religi besutan Ustadz Yusuf Mansyur berjudul Kun Fayakun.

Masih di tahun yang sama pula, wanita yang memiliki senyum anggun ini memperoleh peran sebagai Noura binti Bahadur dalam film Ayat-ayat Cinta yang diangkat dari novel karya Habiburrahman El Shirazy. Pada film yang tayang pada 2008 tersebut, Zaskia menjadi sosok antagonis yang terobsesi dengan Fahri (Fedi Nuril) dan menuduh kalau ia telah memperkosa Noura agar bisa dinikahi.

Selanjutnya, Zaskia juga hadir dalam film Doa yang Mengancam sebagai Suster Irene dan Sang Pencerah, sebuah film tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan. Film-film lain yang juga diperankan yaitu Panik (2014), Hijab (2015), Youtubers (2015), dan Surga yang Tak Dirindukan (2015).

Selain bermain peran, artis multitalenta ini pernah menjadi presenter Go Girls yang tayang di Trans TV berkolaborasi dengan Shandy Aulia dan Nabila Syakieb. Begitupun acara Tak Ada yang Abadi pernah dipandunya bersama Ali Zainal. Bahkan, saat ulang tahun Jakarta 2007 silam, Zaskia dan Mediana Hutomo dikontrak untuk menjadi MC oleh salah satu bank swasta terkenal.

Dalam hal asmara, Zaskia pernah bertekad ingin menikah muda. Wanita yang lahir di Jakarta, 8 September 1987 ini pernah dekat dengan Syahrul Gunawan, Tommy Kurniawan, dan pria asal Turki, Alaa Muthalib. Namun, siapa sangka jodoh Zaskia adalah sutradara film Ayat-Ayat Cinta, film yang ia ikut di dalamnya, Hanung Bramantyo.

Meski terpaut selisih usia 12 tahun, namun, itu bukanlah sebuah halangan. Mereka resmi menikah pada 14 September 2009 di Masjid Al-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Zaskia dan Hanung telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Kana Sybilla Bramantyo, Kala Madali Bramantyo, dan Bhai Kaba Bramantyo. Meksi sudah berkeluarga, Zaskia Mecca tetap beraktivitas di dunia hiburan. Bahkan ia menambah kesibukannya dengan membuka bisnis fashion dengan merek namanya (berbagai sumber)



BENARKAH ASMA BISA SEBABKAN KEMATIAN?

APAKAH asma bisa memicu kematian? Pertanyaan semacam itu normal jika terus menghantui Anda saat orang terdekat atau diri Anda sendiri terdiagnosis asma.

Perlu diketahui, asma adalah penyakit kronis seumur hidup yang memengaruhi saluran udara.

Penyakit ini telah menjangkiti sekitar 235 juta orang di seluruh dunia, baik orang dewasa dan anak-anak. Namun, hanya 10 persen dari penderita asma yang mengalami kondisi parah.

Bisakah asma menyebabkan kematian?

Dalam beberapa kasus, serangan asma bisa menyebabkan kematian. Contoh kasus yang terjadi di AS pada tahun 2019, di mana lebih dari tiga ribu orang meninggal karena serangan asma.

Ketika saluran udara mengalami peradangan yang parah dan menyempit, tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup ke paru-paru.

Lendir dan dahak juga dapat memenuhi saluran udara hingga membatasi pernapasan.

Kebanyakan penderita asma dapat mengendalikan kondisinya dengan menghindari pemicunya, minum obat untuk mengendalikan asmanya, dan minum obat saat gejala asmanya memburuk.

Namun, ada beberapa pasien yang mengalami asma parah hingga tidak bisa merespon pengobatan biasa.

Pasien seperti ini perlu mendapatkan rujukan ke klinik spesialis sehingga tim medis dapat menemukan kombinasi perawatan yang tepat dan sesuai.

Sayangnya, dokter belum mengetahui mengapa beberapa orang mengalami asma yang parah.

Asma yang parah

bisa mencegah pasokan oksigen yang masuk ke paru-paru. Akibatnya, pernapasan pun terhenti.

Kondisi ini bisa cepat memburuk jika pasien tidak mendapatkan perawatan medis dengan segera. Oleh karena itu, serangan asma parah bisa dianggap sebagai kondisi darurat medis.

Di antara penyebab kematian akibat serangan asma, 65 persen kasus dipengaruhi oleh faktor pasien yang dapat dihindari, misalnya:

- orang yang terus merokok atau terpapar asap rokok meskipun didiagnosis asma

- orang yang tidak mengikuti saran pengobatan asma dari dokter

- orang yang jarang kontrol untuk meninjau penyakit mereka.

Data Global Allergy & Airways menemukan bahwa 45 persen pasien asma meninggal sebelum mereka mencari bantuan medis atau sebelum perawatan medis darurat diberikan.

Hampir seperempat dari mereka yang meninggal karena asma pernah ke unit gawat darurat rumah sakit karena asma setidaknya sekali dalam setahun sebelumnya.

Tanda serangan asma

Memahami tanda-tanda terjadinya

serangan asma sangat penting untuk mengambil tindakan dengan cepat.

Tanda-tanda serangan asma parah, di antaranya mengi, batuk, sulit bernapas, dada sesak, dan nyeri dada.

Kadang-kadang gejala asma yang parah bisa menjadi lebih buruk atau lebih sering sebelum serangan asma yang parah terjadi.

Misalnya, Anda merasa bahwa gejala asma lebih mengganggu kehidupan sehari-hari atau aktivitas biasa Anda, atau Anda mungkin perlu menggunakan inhaler lebih sering dari biasanya.

Anda juga bisa merasakan gejala asma yang buruk di malam hari.

Jika Anda menyadari bahwa gejala yang biasa Anda alami semakin memburuk, segera berkonsultasi dengan dokter. (Berbagai Sumber)



SERANGAN ASMA YANG BENAR-BENAR PARAH JUGA BISA DITANDAI DENGAN HAL BERIKUT:

- Pernapasan cepat
- Sesak napas ekstrim
- tidak dapat menarik atau menghembuskan napas sepenuhnya
- Tidak dapat berbicara dalam kalimat lengkap
- Kebingungan atau agitasi
- Gejala tidak mereda meski menggunakan inhaler.



Kamera Canon EOS R8 Cocok untuk Kamera Profesional

FOTOGRAFER profesional Aldo Sinatra dan videografer profesional Jibril Fitra Erlangga menilai kamera Canon EOS R8 cocok dijadikan kamera profesional meskipun ukurannya kecil, karena bisa menghasilkan foto dan video dengan kualitas baik dan memiliki nilai jual.

Fotografer yang biasa mengerjakan proyek foto komersial dan poster film itu mengaku sangat terbantu dengan kemampuan Canon EOS R8 yang dapat mengambil gambar beruntun dengan kecepatan tinggi hingga 40 bingkai per detik (frame per second).

"Electronic fps-nya yang 40 (bingkai per detik) fps itu ngebanter banget sih kalau buat ngejar-ngejar momen," kata Aldo.

Dia menambahkan warna gambar yang dihasilkan Canon EOS R8 sudah memuaskan sehingga dia mengaku tidak perlu mengatur pewarnaan gambar terlalu banyak karena warna dasar yang dihasilkan sudah cukup bagus. Fitur perbesar gambar (zoom) pada kamera tersebut juga menurut-

nya tidak kalah baik dari varian seri R Canon lainnya.

Aldo mengatakan aspek yang paling disukainya dari kamera Canon EOS R8 adalah pewarnaan gambarnya yang baik, bobotnya yang ringan sehingga mudah dibawa, dan fitur teknologi cerdas pada kamera tersebut yang dapat mendeteksi bagian wajah pada manusia.

Sementara Jibril Fitra Erlangga mengatakan sebagai seorang videografer yang sering mengambil video tanpa tripod (handheld) dia menilai Canon EOS R8 cocok dengannya karena memiliki fitur stabilisasi video yang memuaskan.

Dia mengaku fitur Canon EOS R8 favoritnya adalah fitur Canon Log 3 yang berguna ketika proses setelah pengambilan video terutama ketika pengaturan pewarnaan video.

"Kalau buat personal aku karena sebagai videografer yang paling kepake banget fiturnya Canon Log 3 itu

sih, karena misalnya aku R8 ini jadi second cam (kamera sampingan) nya Canon EOS R5 atau R5C gabungin warnanya ga terlalu sulit, tone-nya udah sama, misal kita apply adjustment layer yang sama warnanya ga beda jauh," kata Jibril.

Dia menambahkan fitur fokus otomatis (auto focus) pada kamera tersebut juga membuatnya tidak perlu khawatir ketika dia sedang tidak memperhatikan layar kamera ketika fokus dalam mengambil video dalam jarak dekat.

EOS R8

Kamera mirrorless full-frame Canon EOS R8, yang baru saja diluncurkan, di samping beberapa fitur untuk pengambilan foto juga menawarkan fitur-fitur perekaman video dan sinema profesional yang beragam.

Canon EOS R8 memiliki opsi perekaman video dengan dinamis tinggi hingga 4:2:2 10 bit. Pengaturan high dynamic range perceptual quantization (HDR PQ) dapat memberikan rentang dinamis yang luas dan warna yang lebih indah.

EOS R8 menghadirkan teknologi Canon Log 3 yang membantu proses setelah produksi video dengan memberikan pengolahan warna yang lebih profesional.

Saat pengambilan video gerakan lambat, Canon EOS R8 dapat menghasilkan video yang bisa diputar ulang enam kali lebih lambat pada 30p karena kamera itu mendukung pengambilan gambar Full HD hingga 180 bingkai per detik

alias 180p.

Bagi pengguna yang merekam video tanpa tripod, Canon EOS R8 memiliki fitur Movie Digital IS yang secara digital dapat mengoreksi kemiringan stabilisasi gambar 5 sumbu sehingga hasil videonya menjadi lebih stabil.

Untuk pengambilan video pada kondisi minim cahaya, kamera itu memiliki sensitivitas ISO hingga 25.600 untuk rentang kecerahan fokus hingga EV -4.

Canon juga menyediakan fitur Focus breathing correction pada kamera mirrorless itu, yang berfungsi mengurangi perubahan sudut pandang yang tidak diinginkan selama transisi fokus sehingga memberikan kontrol lebih besar terhadap transisi fokus yang penting untuk subjek. Selain itu, ada juga fitur False colours and zebras yang berfungsi untuk memudahkan pengaturan kecerahan termasuk dalam kondisi cahaya yang sulit.

Fitur Aspect marker display berfungsi untuk mengubah rasio video sesuai kebutuhan pengguna, contohnya untuk konten media sosial seperti Instagram dan Tiktok. Fitur itu menyediakan pilihan rasio seperti 1:1, 16:9, dan sebagainya.

Untuk menghubungkan audio dan video ke perangkat komputer, Canon menyediakan koneksi USB UVC (USB Video Class)/UAC (USB Audio Class). Fitur itu cocok digunakan ketika pengguna ingin melakukan siaran langsung (Ant)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

ANAK YANG MEMILIKI ALERGI JANGAN DIKEKANG

DOKTER anak konsultan alergi imunologi yang juga terhimpun dalam anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Isman Jafar, Sp.A(K) mengimbau agar para orang tua tidak terlalu mengekang anak yang mengidap alergi, khususnya makanan.

"Itu malah kita jadi merusak hidup seorang anak. Kan anak itu mau coba semua. Kalau ibunya punya pola pikir 'Jangan, kamu kan alergi. Nggak boleh'. Jadi anaknya mau ini dikekang, mau itu nggak boleh," ungkap Isman saat dijumpai di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu.

"Padahal yang betul adalah sebelum ada bukti hitam di atas putih (pernyataan dokter) anak itu alergi, itu hanya prasangka saja. Mungkin betul, tapi jangan mengekang anak," imbuhnya.

Selanjutnya, Isman menjelaskan bahwa alergi terhadap makanan atau food allergy akan meningkat tinggi di usia 1 sampai 2 tahun. Namun, itu tidak berarti ibu melarang anak mengonsumsi makanan tersebut selama-lamanya.

"Jadi kalau misalnya usia di atas 2 tahun itu akan makin berkurang. Dan misalnya kalau sudah 6 sampai 7 tahun ya jangan dilarang-larang juga. Kita biarkan saja anaknya makan makanan tersebut dengan harapan akan timbul toleransi," kata Isman.

"Nah toleransi ini adalah kebalikan dari alergi. Jadi zat yang tadinya tubuh anggap berbahaya, kita sudah mengenal zat tersebut. Sehingga lama-lama tubuh sudah akrab dengan zat tersebut. Jadi berteman jadinya. Nah itu yang kita harapkan anak-anak akan bisa toleransi," sambungnya.

Kendati demikian, Isman juga mengingatkan bahaya apabila anak sudah mengalami reaksi anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan terjadi secara tiba-tiba setelah tubuh terpapar pemicu alergi.

"Tapi ada bahayanya juga. Ketika dikasih misal timbul reaksi anafilaksis. Misal menyerang beberapa anggota tubuh seperti jantung dan lain-lain. Nah itu risiko. Jangan coba-coba. Tapi kalau belum ada bukti pasti, biasa saja. Santai saja," terangnya.

Di sisi lain, psikolog anak dan parenting coach Irma Gustiana A, S.Psi., M.Psi juga menyampaikan hal serupa. Dia mengimbau agar orang tua tidak memberikan label alergi terhadap anak-anaknya.

"Jangan kasih label. Misalnya ngomong 'Kamu tuh kan alergian nak' gitu. Jangan begitu. Karena dia akan

sugesti ke dirinya 'Aku tuh alergian. Aku tuh lemah, aku beda'. Bisa dua yang terjadi. Antara dia nggak pede atau dia bisa jadi sangat membuat itu menjadi alasan," papar Irma.

"Karena anak itu tricky. Dia bisa memanipulasi itu. Jadi jangan labeling. Tapi dia tetap perlu tahu kondisi dia. Jadi cara komunikasiannya 'Kalau makan ini nanti kamu batuk. Kita cari yang lain ya atau kita cari yang rasanya mirip' gitu," kata dia.

Alergi adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh mengeluarkan reaksi yang berlebihan terhadap suatu zat yang memicu alergi atau yang disebut juga alergen.

Sistem kekebalan tubuh ini kemudian akan menyerang alergen yang menyebabkan munculnya gejala-gejala pada tubuh.

Alergi pada anak bisa memengaruhi berbagai organ tubuh, mulai dari paru, kulit, saluran kencing, jantung, bahkan sampai saraf pusat pada otak.

Selain itu, reaksi alergi yang dialami anak juga bisa sangat serius, bahkan membahayakan nyawa.

Sampai saat ini, penyebab alergi masih belum diketahui secara pasti. Namun, faktor genetik dipercaya sangat berpengaruh terhadap terjadinya alergi pada anak.

Bila kedua orangtua memiliki riwayat alergi, maka risiko anak mengalami alergi meningkat hingga 70 persen (berbagai sumber)



Jangan kasih label. Misalnya ngomong 'Kamu tuh kan alergian nak' gitu. Jangan begitu. Karena dia akan sugesti ke dirinya 'Aku tuh alergian. Aku tuh lemah, aku beda'. Bisa dua yang terjadi. Antara dia nggak pede atau dia bisa jadi sangat membuat itu menjadi alasan. Karena anak itu tricky. Dia bisa memanipulasi itu. Jadi jangan labeling. Tapi dia tetap perlu tahu kondisi dia. Jadi cara komunikasiannya 'Kalau makan ini nanti kamu batuk. Kita cari yang lain ya atau kita cari yang rasanya mirip' gitu"

**Irma Gustiana A,
S.Psi., M.Psi**

psikolog anak dan parenting



Menteri Jokowi ... (dari hal 1)

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa menteri tak harus mundur untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Putusan ini diketok oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva, yang saat itu memimpin sidang pembacaan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut putusan MK, jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri, yang bersangkutan dapat dipertahankan, atau sebaliknya. Jabatan menteri berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis sehingga eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham.

Selanjutnya, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif punya potensi menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pencalonannya. Namun MK menilai, hal itu dapat ditekan karena ada mekanisme kontrol dari Presiden, DPR, maupun oleh masyarakat.

"Betapa pun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuat menteri, tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 UUD 1945," demikian argumen MK saat itu.

Namun demikian, merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012 khususnya Pasal 51 ayat (1) huruf k, seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mundur dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pemilu 2019 lalu, Jokowi mempersilakan menterinya maju sebagai caleg. Saat itu, Presiden mengatakan, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak harus mundur, tetapi wajib cuti.

Putusan serupa dibacakan pada Senin (31/10/2022) yang merupakan jawaban atas permohonan Partai Garuda yang menguji konstitusionalitas Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. Pasal itu mengharuskan menteri mundur dari jabatannya ketika menjadi capres atau cawapres. Adapun Partai Garuda meminta MK memutuskan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional.

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, gugatan Partai Garuda ini dikabulkan sebagian karena menteri juga memiliki hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. "Terlepas pejabat negara menduduki jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar pengangkatan, seharusnya hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi," ujar Arif mem-

bacakan pertimbangan hukum hakim konstitusi.

Untuk diketahui, jelang Pemilu 2024, sejumlah menteri Jokowi juga disebut-sebut bakal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Salah satunya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu rencananya bertarung di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

"Iya, Insyaallah [Zulhas] akan mencalonkan diri di Jawa Tengah I," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Zulhas pada pemilu sebelumnya rutin maju Caleg di Dapil Lampung I yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Viva mengatakan Zulhas kini berpindah Dapil untuk merengkuh suara PAN di Jawa Tengah yang turun pada Pemilu 2019 lalu. "Untuk memperkuat Dapil Jawa Tengah karena di pemilu 2019 lalu PAN kehilangan delapan kursi DPR RI," kata Viva.

Adajuga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga disebut-sebut hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Pemilu 2024. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dikabarkan bakal maju dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar juga dikabarkan bakal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PKB.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Ida telah diplot menjadi caleg di Dapil Jakarta II yang meliputi Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri. "[Abdul Halim Iskandar] Rencana [maju Caleg] di Dapil Jatim, namun Dapil yang pas sedang dicocokkan," kata Jazilul.

Senada, Wakil Menteri Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor telah memutuskan maju sebagai caleg DPR dari Dapil Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor di Pemilu 2024. Pada tahun 2019, Ferry sempat maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Selatan yang meliputi Palembang, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Banyuasin. "Saya Dapil V Jabar Kabupaten Bogor untuk DPR RI," kata Ferry.

Tak ketinggalan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo juga akan maju kembali lewat Partai Perindo. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengatakan Angela akan maju lagi dari Dapil Jatim I meliputi Surabaya dan Sidoarjo seperti Pemilu 2019 lalu. "Pasti maju. Sudah dipersiapkan dengan matang. [Di Dapil] Jatim kampung halaman bu Wamen," kata Rofiq.

PDI Perjuangan juga memastikan bahwa akan ada menterinya di Kabinet Indonesia Maju yang bakal mendaftarkan diri sebagai caleg Pemilu 2024. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, jumlah caleg yang berlatar belakang menteri

Jokowi akan bertambah. Namun demikian, dia belum bisa memastikan siapa saja sosok menteri itu. "Jumlah menteri yang didaftarkan menjadi caleg pada Pemilu 2024 juga akan bertambah," katanya saat jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Adapun kader PDI-P yang duduk sebagai menteri Jokowi di antaranya Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Lalu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Ada pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Tak lupa, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Langgengkan Kekuasaan?

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati berpandangan fenomena menteri aktif yang maju sebagai Caleg bukan fenomena baru dalam kancah politik Indonesia. Ia mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipatif sang politikus tetap berada di kekuasaan bila tak lagi menjabat di ranah eksekutif usai Pemilu 2024.

"Karena pada dasarnya itu adalah upaya antisipatif bilamana nanti sudah tidak di ranah eksekutif di periode berikutnya sehingga karir mereka masih bisa berjalan di lingkaran kekuasaan," kata Wasis.

Meski tak dilarang maju caleg, Wasis beranggapan para menteri tetap menyeimbangkan antara kerja politik dan kerja di pemerintahan. Baginya, hal ini penting agar para menteri agar tidak timpang kinerjanya.

"Selama masih berstatus seorang menteri di pemerintahan, profesionalitas itu perlu dijaga. Karena dari situ lah bisa berdampak positif pada citra positif dan persepsi publik," kata dia.

Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan putusan MK ini jelas merugikan rakyat dan merusak tatanan demokrasi. Putusan ini memihak kepada kekuasaan, yakni para menteri dan partai politik. "Semestinya menteri mundur lah ketika nyapres. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye," ujarnya.

Ujang menjelaskan, ketika seorang menteri maju sebagai capres atau cawapres, dia pasti akan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye maupun untuk kepentingan politik elektoral lainnya. Fasilitas itu misalnya berupa kendaraan, rumah dinas, dan keuangan.

Selain itu, menteri juga sangat mungkin memobilisasi PNS di kementeriannya agar memberikan dukungan dan ikut berkampanye. "Termasuk memobilisasi pegawai birokrasi di daerah-daerah karena kementerian itu kan ada kantor-kantor dinas di daerah," ujarnya.

Untuk diketahui, Partai Hati Nurani Rakyat menjadi partai politik kedua yang mendaftarkan anggotanya sebagai bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum RI. Penyerahan

nama bakal caleg dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang beserta jajaran petinggi partai, Rabu (10/5/2023). "Kami menyerahkan daftar caleg sebanyak 580 orang dan 84 dapil, semuanya lengkap," kata Oesman di kantor KPU RI.

Oesman mengatakan, calon yang diajukan partainya telah melebihi ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Total caleg perempuan yang didaftarkan menurut dia mencapai 32 persen. Oesman percaya kualitas bakal caleg tidak bisa ditentukan melalui jenis kelamin. "Buktinya ada Ketua Umum partai perempuan, ya kan. Mudah mudahan ada lagi Ketua Umum Partai perempuan, jangan laki terus, semoga nanti 50 persen perempuan dan 50 persen laki Ketum parpol," kata Oesman.

Hingga hari ke-10 pendaftaran calon anggota legislatif, baru Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan kadernya ke KPU. Semula, selain Hanura, Partai Nasional Demokrat juga berencana mendaftarkan kadernya sebagai caleg ke KPU hari ini. Namun, karena suatu alasan, pendaftaran dilakukan pada Kamis (11/5/2023). Selain Partai Nasdem, Kamis juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijadwalkan akan mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Pusat. (wid,rls,kcm, dtc/dya)

PERBANDINGAN GAJI MENTERI VS ANGGOTA DPR

GAJI DPR RI

- Gaji pokok anggota DPR RI sebesar **Rp4.200.000 per bulan**
- Tunjangan istri sebesar **Rp420.000 per bulan**
- Tunjangan anak sebesar **Rp168.000 untuk dua orang anak per bulan**
- Tunjangan jabatan sebesar **Rp9.700.000 per bulan**
- Tunjangan kehormatan sebesar **Rp 5.580.000 per bulan**
- Tunjangan komunikasi sebesar **Rp 15.540.000 per bulan**
- Tunjangan fungsional dan pengawasan sebesar **Rp 3.750.000 per bulan**
- Secara perhitungan, total gaji anggota DPR RI per bulannya **mencapai Rp39.358.000**. Namun, gaji sebesar ini belum ditambah tunjangan lain seperti tunjangan perumahan, tunjangan jabatan ketua dan wakil, dan tunjangan pribadi lainnya

GAJI MENTERI

- Untuk gaji pokok seorang menteri sendiri sebesar **Rp 5.040.000 per bulan**.
- Untuk tunjangan menteri sendiri sebesar **Rp13.608.000 per bulan**. Namun, tunjangan ini tentu belum termasuk tunjangan lainnya seperti perumahan dan operasional lain yang diperoleh menteri.
- Total, seorang menteri mendapatkan gaji sekitar **Rp18.648.000 per bulan**.

Rafael Alun Bisa Dimiskinkan Usai Jadi Tersangka Pencucian Uang



Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (tengah) memasuki mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (dok)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aset-aset milik Rafael Alun kini tengah ditelusuri oleh komisi anti-rasuah. Tak hanya itu, kasus yang sebenarnya berawal dari penganiayaan yang dilakukan putranya ini bisa membuat Rafael dimiskinkan.

"Penerapan TPPU sejalan dengan komitmen KPK untuk memaksimalkan penyitaan dan perampasan sebagai aset recovery hasil korupsi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).

Rafael Alun awalnya dijerat sebagai tersangka dugaan gratifikasi. KPK kemudian menemukan dugaan penyamaran hingga penyembunyian aset hasil korupsi oleh Rafael. "Diduga kuat ada kepemilikan aset-aset tersangka RAT yang ada tautan dengan dugaan TPPU di antaranya dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta miliknya yang diduga bersumber dari korupsi," kata Ali.

Plt Deputy Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan, salah satu aset milik Rafael Alun yang kini tengah ditelusuri KPK berupa uang digital. Asep menyebut pihaknya masih mendalami dugaan kepemilikan perusahaan cangkang dari Rafael.

"Saat ini sedang kita telisik termasuk juga perusahaan-perusahaan cangkang. Kan ada bisa tuh ke luar negeri ada satu negara yang memang khusus mengeluarkan perusahaan-perusahaan itu. Jadi didaftarkan ke sana," kata Asep.

"Nanti itu hanya sebagai perusahaan cangkang saja. Ada juga yang diberiin tadi crypto currency atau bitcoin dan lain-lainnya itu juga sedang kita telusuri," tambahnya.

Menurut Asep, penyidik saat ini tidak hanya berfokus pada penelusuran aset Rafael yang terdaftar secara sah. Tim penyidik, kata Asep, juga melacak aset Rafael yang disamarkan dengan nama orang lain. "Semuanya intinya akan kita telusuri. Tidak hanya

menemukan kekayaan atas nama yang bersangkutan, atau pun itu misalkan yang disembunyikan atas nama orang lain atas nama keluarganya, orang terdekatnya," ujar Asep.

Dalam kasus gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo sudah terlebih dahulu dijerat sebagai tersangka gratifikasi yang nilainya hingga puluhan miliar rupiah. Saat ini, ia sudah ditahan KPK.

Kasus gratifikasi ini diduga terkait dengan jabatan Rafael Alun sebagai pegawai pajak. Pada 2005, Rafael Alun resmi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kewenangannya termasuk melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2011, Rafael Alun diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I.

Dengan jabatannya itu, Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak dengan disertai pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya.

Diduga, Rafael Alun menerima gratifikasi dari wajib pajak. Nilainya hingga USD 90 ribu atau sekitar Rp 1.347.804.000. Dalam penyidikannya, KPK turut menemukan safe deposit box yang diduga milik Rafael Alun. Di dalamnya, terdapat uang Rp 32,2 miliar. Sumber uang tersebut masih didalami oleh penyidik.

Berkas Mario Dilimpahkan Polisi ke Jaksa Lagi

Terkait kasus anak Rafael Alun, polisi akhirnya kembali melimpahkan berkas Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas, tersangka penganiayaan berat dengan korban David Ozora Latumahina ke jaksa. "Ya benar hari ini ke Kejati DKI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Rabu (10/5/2023).

Penyerahan berkas oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan usai jaksa penuntut umum (JPU) mengembali-

kan berkas karena perlu dilengkapi atau P19. Hal itu sesuai catatan JPU yang telah diserahkan kepada penyidik beberapa hari lalu.

Maka dari itu, kata Trunoyudo, setelah JPU menerima berkas perkara, beberapa hari ke depan akan kembali dilakukan penelitian untuk selanjutnya menyatakan apakah berkas lengkap (P21) atau dikembalikan (P19).

"Betul siang tadi per tanggal Mei 2023 penyidik mengirim kembali berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta. Selanjutnya berkas tersebut akan diteliti kembali oleh Tim JPU apakah petunjuk-petunjuk yang telah diberikan sudah penuh atau belum," kata Kasipenkum Kejati DKI Ade Sofyansah.

Sebelumnya, Persidangan tersangka penganiayaan David Latumahina, Mario Dandy Satriyo hingga kini belum dijadwalkan. Sebab, berkas perkara masih bolak balik antara penyidik Polri dan Kejaksaan.

Pengacara David Latumahina, Mellisa Anggraini mempertanyakan lambannya proses berkas perkara. Baik berkas Mario Dandy dan Shane Lukas Rotua Pangodion Lumbantoran. Pun ia mempertanyakan masa penahanan kedua tersangka. "Itu menjadi

pertanyaan juga di kami, sejauh ini melihat dari batas masa tahanan, kita kawal sehingga tidak melewati itu," kata Mellisa saat dihubungi, Rabu (10/5/2023).

Mellisa menerangkan, pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya dan kejaksaan. Informasi terakhir, Polda Metro Jaya berencana serahkan berkas kedua tersangka ke Kejati DKI Jakarta pada Kamis, (11/5/2023). Apabila, dinilai lengkap maka kemungkinan sidang perdana bakal di gelar pada akhir Mei atau awal Juni 2023.

"Nanti Kejati akan memeriksa lagi, kalau sudah selesai katanya sebelum tanggal 21 akan dilakukan tahap 2. Sehingga kemungkinan sidangnya akan dimulai akhir bulan ini atau awal bulan," ujar dia. Mellisa sampaikan kekhawatiran habisnya masa penahanan kedua tersangka ke kejaksaan dan Polda Metro Jaya.

Dia pun mendesak kepada kedua institusi untuk segera memenuhi berkas perkara. Menurut dia, tidak perlu lagi menggali motif. Sehingga, yang perlu didalami seharusnya pola perencanaan, perbuatan pada saat melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat. (dya,rls, kum.mer/dya)

DAFTAR KEKAYAAN

RAFAEL ALUN TRISAMBODO

